

Lampiran 1



UMY UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA
Unggul & Islami

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Program Studi Manajemen (Terakreditasi A, 2013)
- Program Studi Akuntansi (Terakreditasi A, 2015)
- Program Studi IESP (Terakreditasi A, 2016)

No. : 32/A.1-II /FEB/II/2019
Hal : Permohonan penelitian

Kepada Yth.
Kepala Desa Ponggok
Jl. Delanggu, Polanharjo, Jeblogan, Ponggok
Klaten, Jawa Tengah

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Sehubungan dengan tugas akhir skripsi, maka bersama ini kami Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mohon ijin untuk mahasiswa berikut ini dapat melakukan penelitian. Data yang didapatkan akan kami gunakan untuk kepentingan Akademik.

Adapun mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Faradillah Hasan
Tempat / Tgl Lahir : Biak, 22 Agustus 1996
N I M : 20150420034
Program studi : Akuntansi
Alamat : Tundan Baru, Tamantirto, Kasihan, Bantul
Nomer Telpon : 085254109560

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Februari 2019
Dekan,



Rizal Yaya, S.E., M.Sc., Ph.D., Ak., CA.

ADDRESS

Kampus Terpadu UMY
Jl. Lingkar Selatan - Tamantirto - Kasihan - Bantul
Yogyakarta 55183
Indonesia

CONTACT

Phone : +62 274 387656 ext.117
Fax : +62 274 387646
Email : info.feb@umy.ac.id
Web : www.umy.ac.id

Lampiran 2

Variabel	Aspek	Indikator
<i>Reinventing Government</i>	<i>BUMDes yang katalis</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan kebijakan yang memungkinkan mendorong atau melahirkan usaha mikro baru bagi anggotanya ataupun masyarakat secara luas. • Perbandingan jumlah unit usaha yang langsung berada di bawah BumDes dengan yang tidak langsung
	<i>BUMDes adalah milik masyarakat</i>	<p>Tingkat pelibatan masyarakat dalam pengelolaan bumdes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya musyawarah dalam menentukan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan BUMDes • kontribusi BUMDes dalam pembangunan masyarakat
	<i>BUMDes bersifat kompetitif</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah unit usaha dalam satu <i>resources</i> baik yang berada dalam bagian BumDes secara langsung maupun tidak langsung. • Bentuk apresiasi kepada unit usaha baik yang berada dalam bagian BumDesa secara langsung, maupun secara tidak langsung per periodik. • Peraturan khusus mengenai izin usaha dengan standarisasi pelayanan yang terukur.
	<i>BUMDes berorientasi misi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Misi yang ada di BumDes • Kesesuaian antara misi dengan tujuan strategis BumDes • Paradigma <i>actor</i> kunci

<i>Reinventing Government</i>		di BumDes dalam menentukan perilaku yang mendukung ketercapaian dari misi yang ada.
	<i>BUMDes berorientasi hasil</i>	Bentuk apresiasi kepada anggota BUM Desa dalam bentuk Tunjangan Kinerja ataupun yang sejenisnya
	<i>BUMDes berorientasi pelanggan</i>	Kepuasan pelanggan, (ada tidaknya sistem pelayanan kepuasan dan saran dari pelanggan atau msyarakat)
	<i>BUMDes bersifat wirausahawan</i>	Tingkat ketergantungan kepada pemerintah desa
	<i>BUMDes yang antisipatif</i>	Workshop, <i>training</i> atau kegiatan sejenis kepada anggota, unit usaha BumDes, dan unit usaha sekitar.
	<i>BUMDes berbasis desentralisasi</i>	Dilihat dari model pusat pertanggungjawabannya.
	<i>BUMDes yang berorientasi pasar</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian-kajian mengenai potensi pasar yang dilakukan oleh divisi <i>Research and Development (RnD)</i> atau LitBang BumDes. • Tingkat kepuasan dari konsumen unit usaha BUM Desa

Lampiran 3

PANDUAN WAWANCARA

A. BUM Desa yang katalis:

1. Bagaimana upaya pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan BUM Desa Tirta Mandiri?
2. Adakah program khusus untuk mendorong masyarakat berkesempatan membuka usaha mikro baru?
3. Berapa jumlah unit usaha yang ada di desa ponggok sebelum hadirnya bumdes tirta mandiri?
4. Berapa jumlah unit usaha yang ada di desa ponggok setelah hadirnya bumdes tirta mandiri?

B. BUM Desa adalah milik masyarakat:

1. Adakah unit usaha yang di usung oleh masyarakat sendiri, dan di terapkan di bawah BUM Desa Tirta Mandiri?
2. Metode partisipasi masyarakat seperti apa yang digunakan oleh BUM Desa Tirta Mandiri?
3. Apakah anggota BUM Desa Tirta Mandiri dan masyarakat di libatkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program?
4. Bagaimana cara BUM Desa Tirta Mandiri menjaga sinergisitas antara anggota BUM Desa Tirta Mandiri dan masyarakat?

C. BUM Desa bersifat kompetitif:

1. Apakah ada unit usaha di desa ponggok yang berada di luar dari naungan BUM Desa Tirta Mandiri?
2. Berapa jumlah unit usaha dalam satu *resources*, di luar dari naungan BUM Desa?
3. Berapa jumlah unit usaha dalam satu *resources*, di dalam naungan BUM Desa?
4. Adakah apresiasi yang di berikan oleh bumdes kepada unit usaha yang berada di dalam naungan BUM Desa Tirta Mandiri?
5. Adakah apresiasi yang di berikan oleh bumdes kepada unit usaha yang berada di luar naungan BUM Desa Tirta Mandiri?
6. Apakah ada peraturan khusus mengenai izin usaha dengan standarisasi pelayanan yang terukur untuk unit usaha baik di dalam naungan bumdes maupun di luar naungan BUM Desa Tirta Mandiri?

D. BUM Desa berorientasi misi:

1. Apakah setiap unit usaha yang ada di bumdes mengetahui misi BUM Desa Tirta Mandiri? (sebutkan)
2. Apakah setiap tujuan strategis yang ada di unit usaha sudah sesuai dengan misi dari BUM Desa Tirta Mandiri?
3. Apakah sistem anggaran mendukung pencapaian misi BUM Desa Tirta Mandiri?

E. BUM Desa berorientasi hasil:

1. Apakah penggajian dan penghargaan di dasari pada kualitas hasil kerja?
2. Apakah ada tolak ukur keberhasilan atau pencapaian pada setiap unit usaha yang ada di BUM Desa Tirta Mandiri?

F. BUM Desa berorientasi pelanggan:

1. Apakah ada metode khusus yang digunakan BUM Desa Tirta Mandiri untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan?
2. Apakah ada sistem pelayanan kepuasan dan penerimaan saran dari pelanggan?
3. Apakah sejauh mana sistem pelayanan kepuasan berkontribusi dalam peningkatan jumlah pelanggan?

G. BUM Desa bersifat wirausahaan:

1. Apakah dari segi anggaran, BUM Desa Tirta Mandiri bergantung pada pemerintah desa
2. Apakah dari segi anggaran, setiap unit usaha di BUM Desa Tirta Mandiri bergantung pada pemerintah desa?

H. BUM Desa bersifat antisipatif:

1. Apakah ada metode pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)?
2. Seperti apa metode yang digunakan oleh BUM Desa Tirta Mandiri?
3. Berapa presentasi keterlibatan anggota, dan unit usaha dalam program pengembangan SDM di BUM Desa Tirta Mandiri?

I. BUM Desa berbasis desentralisasi

1. Apakah ada struktur organisasi yang jelas dalam kepengurusan BUM Desa Tirta Mandiri?
2. Apakah setiap struktural sudah menjalankan fungsinya sesuai dengan yang seharusnya?
3. Bagaimana alur koordinasi dari setiap struktural selama berjalannya bumdes tirta mandiri?

J. BUM Desa yang berorientasi pasar

1. Apakah ada kajian-kajian yang dilakukan oleh divisi research and development (RnD) atau LitBang BUM Desa Tirta Mandiri mengenai potensi pasar?
2. Apakah produk yang dihasilkan BUM Desa adalah hasil dari kajian mengenai potensi pasar?
3. Strategi pemasaran seperti apa yang diterapkan oleh BUM Desa Tirta Mandiri?
4. Berapa presentasi tingkat kepuasan konsumen mengenai produk dari unit usaha BUM Desa Tirta Mandiri?

Lampiran 4



PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No: 29/1/ee/XII.2014)

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : Faradillah Hasan

NIM : 20150420034

Prodi : Akuntansi

Judul : TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PERSAPEKTIF *REINVENTING GOVERNMENT* (Studi: BUMDES Tirta Mandiri Desa Pongok, Klaten, Jateng)

Dosen Pembimbing : Rizal Yaya, S.E., M.Sc., Ph.D., Ak., C.A.,

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 19%.

Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 05 Maret 2019
Di Perpustakaan Pascasarjana



Nur Hasyim Latif, SIP